



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 45 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan desaperlu adanya dukungan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya perubahan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati Konawe;
- c. bahwa Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab: Konawe Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Telah Dirubah kedalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, sebagaimana telah dirubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor4Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 236);
23. Peraturan Bupati Konawe Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Oprasional Penggunaan Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor )

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO 32 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
2. Bupati adalah Bupati Konawe;
3. Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akuidan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa;
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
15. Kepala Desa PNS adalah Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
16. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian seksi di bidang Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut KAUR adalah Perangkat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan Keuangan, Tata Usaha dan Urusan Umum.
19. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Pemerintahan di wilayah dusun;
20. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa;
22. PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (21) berasal dari Unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Koordinator;
  - b. Pelaksana Kegiatan dan
  - c. Bendahara;
25. Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (22) huruf b adalah Kepala Seksi berdasarkan bidang kegiatan;
26. Bendahara sebagaimana Pasal 1 ayat (22) Huruf c, dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan;
27. Petugas Keagamaan Desa adalah Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu
28. Lembaga Adat Desa adalah Tonomotu'o dan Pabitara
29. ADD Kurang Bayar adalah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang belum dibayarkan pada Pemerintah Desa Tahun 2019 dan akan dibayarkan pada Tahun 2020.



## **BAB II ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020.
- (2) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (3) ADD yang bersumber dari APBN digunakan untuk Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
- (4) Besaran dana desa yang Bersumber dari APBD sebanyak Rp. 64.809.126.700 (Enam Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan ADD yang bersumber dari Tambahan DAU APBN sebanyak Rp. 24.372.934.000 (Dua Puluh Empat Milyard Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dibagi sebanyak 291 Desa Penerima.
- (5) Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Menjadi Utang Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- (6) Penerimaan Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Tahun 2018 dan Tahun 2019 Menjadi Penerimaan Desa dan Pendapatan Desa Tahun 2020.
- (7) Penggunaan ADD Kurang Bayar Tahun 2018 dan Tahun 2019 mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Tahun 2019.

### **Pasal 3**

Daftar Desa penerima dan rincian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI sebagai mana Peraturan ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

## **BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas :
  - 1) Koordinator : Sekretaris Desa.
  - 2) Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi.
  - 3) Bendahara : Kaur Keuangan.
- (3) PPKD secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.

### **Pasal 6**

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
  - a) Bupati Konawe sebagai Pembina.



- b) Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
  - c) Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
  - d) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
  - e) Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.
  - f) Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
  - g) Kepala Bappeda Kab. Konawe sebagai Anggota.
  - h) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
  - i) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
- a) Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
  - b) Melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
  - c) Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
  - d) Memberikan pelatihan/orientasi kepada PPKD tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban ADD
  - e) Melakukan fasilitasi pemecatan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
  - f) Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
  - g) Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim kesekretariatan Kabupaten terdiri dari
1. Kepala Sekretariat : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe.
  2. Sekretaris : Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe.
  3. Anggota :
    1. Kasi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Konawe
    2. Kasi Organisasi dan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe
    3. Kasi Pengembangan dan Pembinaan Pemerintah Desa DPMD Kab. Konawe.
- (4) Tim kesekretariatan Kabupaten mempunyai tugas :
- a) Melakukan fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD.
  - b) Melakukan verifikasi proposal ADD.
  - c) Memproses rekomendasi pencairan ADD.
  - d) Melakukan Monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
  - e) Melaporkan Kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat kabupaten Konawe atas adanya indikasi penyalahgunaan dana ADD.
- (5) Sekretaris memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.
- (6) Tim Kesekretariatan Kabupaten merupakan Tim monitoring dan Evaluasi serta pengawasan ADD.
- (7) Komposisi Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) di tuangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan ADD.

#### **Pasal 7**

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- a) Camat sebagai Ketua Tim.
  - b) Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (P3MD) sebagai Sekretaris.
  - c) Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra sebagai Anggota.



- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a) Mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
  - b) Membantu PPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD besertakelengkapannya.
  - c) Merekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan.
  - d) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
  - e) Memfasilitasi PPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD.
  - f) Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

**BAB IV**  
**BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Besaran Dana Desa**  
**Pasal 8**

Ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut;

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Tahun 2019 terbagi 4 (Empat) Kelompok yaitu :  
2020
  - a) Kelompok A masing-masing sebesar Rp. 305.938.200,- (Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Dua Ratus Rupiah,-)
  - b) Kelompok B masing-masing sebesar Rp. 310.890.600,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah,-)
  - c) Kelompok C masing-masing sebesar Rp. 315.843.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tuga Ribu Rupiah,-)
  - d) Kelompok D masing-masing sebesar Rp. 320.795.400,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah,-)
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana pasal 8 Ayat (1) Point a,b,c,dan d adalah sebagaimana pada Lampiran I,II,III dan IV Peraturan Bupati Konawe.
- (3) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point a adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa.
- (4) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point b adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku atau Pendeta.
- (5) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point c adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku dan Pendeta.
- (6) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point d adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa, Mangku, Pendeta dan Pastor.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Dana Desa**  
**Pasal 9**

Ayat 3 dirubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut;

- (1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah rencana pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (2) Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dibagi atas 2 (Dua) Bidang Belanja yaitu



:Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Belanja Bidang Pembinaan kemasyarakatan.

- (3) Belanja ADD untuk Bidang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Kegiatan Pemerintah Desa, Tunjangan BPD, Operasional RT, Insentif dan Jaminan Sosial Perangkat Desa.
- (4) Belanja untuk Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa dipergunakan untuk biaya Operasional PKK, LPM, Karang Taruna, Tonomotu'o dan Pabitara.
- (5) Rincian Lampiran Penggunaan masing-masing Bidang kegiatan terperinci sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Penerima manfaat Jaminan Sosial Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(3), adalah terdiri dari;
  - a) Kepala Desa;
  - b) Sekretaris Desa;
  - c) Kepala Seksi;
  - d) Kepala Urusan;
  - e) Kepala Dusun;
  - f) Rukun Tetangga;
  - g) Guru TPQ;
  - h) Imam Desa atau sebutan lainnya dan;
  - i) Tonomotu'o.
- (2) Besaran jumlah Jaminan Sosial sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Pasal 11**

- (1) Penghasilan Tetap Kepala desa dan sekretaris desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) diberikan kepada Kepala dan sekretaris desa Non PNS.
- (2) Bagi kepala Desa dan atau penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan sebesar 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa dan sekretaris desa Non PNS setiap bulan.
- (3) Selisih 50 % dari penghasilan Tetap Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa dan sekretaris desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dialihkan untuk membiayai kegiatan Pembangunan infrastruktur desa dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

#### **Pasal 12**

- (1). Pemberian Insentif Tenaga Keperawatan Desa sebagaimana pada pasal 9 ayat (9) diatas diperuntukan untuk tenaga keperawatan yang bertugas di desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tenaga keperawatan desa.
- (2) Tenaga keperawatan yang ditugaskan di desa adalah Tenaga Keperawatan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga keperawatan yang akan bertugas didesa diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di desa dan diusulkan kepala desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.
- (4) Bagi Desa yang tidak mempunyai tenaga keperawatan didesanya dapat meminta tenaga keperawatan desa melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.

### **BAB V**

## **MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD**

### **Paragraf 1**

#### **Mekanisme permintaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Permintaan, Penyaluran dan Pencairan ADD untuk ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.



- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
  - a) Tahap I sebanyak 50% Anggaran
  - b) Tahap II sebanyak 50% Anggaran
- (3) Permintaan pencairan ALokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe untuk diberikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe.
- (4) Desa yang diberikan Rekomendasi tertulis sebagaimana pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi syarat pengajuan:
- (5) Syarat Pengajuan Tahap I Meliputi;
  - a) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD Tahun 2019 dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019.
  - b) Laporan penggunaan ADD Tahun 2019 yang diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan
  - c) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2019
  - d) Bukti Setoran Ppn/PPh Tahun 2019.
  - e) Peraturan Desa Tentang RPJMDesa.
  - f) Peraturan Desa Tentang RKPDesa
  - g) Surat Keputusan tentang penetapan tenaga perawat Desa.
  - h) Berita Acara musyawarah desa tentang penggunaan ADD 2020.
  - i) Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan ADD 2020
  - j) Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD) Tahun 2020.
  - k) Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2020.
  - l) Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan ADD.
  - m) Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan ADD.
  - n) Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
  - o) Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
  - p) Surat Keputusan tentang pengangkatan , RT, Puutobu, Imam Desa, guru TPQ, Mangku, Biksu dan Pabitara.
  - q) Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
  - r) Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
  - s) Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
  - t) Foto Copy SK pengurus Karang Taruna.
  - u) Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD Tahap I bermaterai.
  - v) Rekomendasi Camat.
- (6) Syarat Pengajuan Permohonan Pencairan ADD Tahap II pada Semester ke II melampirkan :
  - a) Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I
  - b) Bukti Setoran Ppn/PPh
  - c) Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD tahap II bermaterai.
  - d) Rekomendasi Camat

#### **Pasal 14**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1),(2),(3) dan (5) Tim Kesekretariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana.

#### **Paragraf 2**

#### **Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa**

#### **Pasal 15**

- (1) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Bendahara kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Rekomendasi Tertulis Pencairan ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Konawe.



- (2) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditransfer ke rekening desa oleh BPKAD Kab. Konawe dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke rekening lain.
- (3) Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke rekening desa menjadi pendapatan desa yang dimasukkan kedalam APBDesa.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORANDAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan - tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap Persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b) Tahap Perencanaan.
  1. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  2. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Masyarakat.
  3. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes).
- c) Tahap Pelaksanaan.
  1. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat, Kepala Desa Wajib Mempublikasi Kegiatan Yang Bersumber dari ADD Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, dan Besaran Anggaran kegiatan
  2. Camat secara aktif melaksanakan pengawasan atas pencairan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penggunaan dana ADD dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Bupati Konawe melalui DPMD
- d) Pertanggungjawaban :

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim PPKD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.
- e) Pelaporan:
  1. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berjenjang.
  2. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
    - aa. Pendahuluan.
    - ab. Program dan Kegiatan ADD / Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
    - ac. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - ad. Laporan Realisasi APBDesa dan Penggunaan ADD
    - ae. Laporan Penggunaan ADD, Bukti Penerimaan, pembayaran dan alat bukti lainnya yang sah.
    - af. tingkat perkembangan kemajuan desa.
    - ag. Perkembangan Fisik kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kemajuan Fisik 0% s/d 100%.
    - ah. Penutup;

#### **Pasal 17**

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Konawe.



**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bantuan Keuangan Pilkades tahun sebelumnya tidak akan diterbitkan Rekomendasi Pencairan Tahaun Anggaran Berikutnya.
- (3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan Administrasi pencairan ADD sampai pada akhir Tahun Anggaran 2020 yang berakibat tidak keluarnya dana ADD desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan di anggarkan ditahun berikutnya (tidak ada anggaran yang diluncurkan).
- (4) Dana ADD yang di maksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada kas Negara.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 19**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 20**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 25-8-2020



Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal : 25-8-2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : 400



LAMPIRAN V : RINCIAN ALOKASI DANA DESA ( ADD )  
 SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2020

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA								TAHAP PEMBAYARAN		KET		
				BIDANG PEMERINTAHAN								PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II	
				SILTAP/TUNI.	INSENTIF	TUNJ. BPD	ATK	JAMSOS								
A	1	ROUTA														
	1	DESA TIRAWONUA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	2	DESA TANGGOLA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	3	DESA WALANDAWE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	4	DESA PUUWIRIRANO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	5	DESA PARUDONGKA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	6	DESA LALOMERUI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	2	LATOMA														
	7	DESA LATOMAJAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	8	DESA ANDOLUTO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	9	DESA PINOLE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	10	DESA WAWOLATOMA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	11	DESA TITIOWA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	12	DESA NESOWI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	13	DESA AMBEKAIRI UTAMA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	14	DESA LALOWATA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	15	DESA ANGONGA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	16	DESA AMBONIKI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	3	ASINUA														
	17	DESA LASADA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	18	DESA ANGOHI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	19	DESA AMUA JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	20	DESA ASIPAKO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	21	DESA ASINUA JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	22	DESA NEKUDU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	4	PADANGGUNI														
	23	DESA PADANG MEKAR	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	24	DESA ATODOPI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	25	DESA MEKAR JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				
	26	DESA ALEUTI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000		14.100.000	152.969.100	152.969.100				



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA						TAHAP PEMBAYARAN		KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN						PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	ATK	JAMSOS					
	27	DESA MATAHORI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	28	DESA SAMBAOSU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	29	DESA PADANGGUNI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	30	DESA GARUDA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	31	DESA MATANGGORAI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	32	DESA LANGGEA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
5	ABUKI												
	33	DESA UNAASI JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	34	DESA ANGGORO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	35	DESA ARUBIA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	36	DESA PUNGGALUKU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	37	DESA SAMBEANI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	38	DESA PADANGGUNI UTAMA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	39	DESA KASUWURA INDAH	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	40	DESA WALAI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	41	DESA KUMAPO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	42	DESA ASOLU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	43	DESA EPEEYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
6	TONGAUNA UTARA												
	44	DESA SANUANGGAMO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	45	DESA BAROWILA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	46	DESA NAMBEA BORU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	47	DESA ANGGOHU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	48	DESA ANDALAMBE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	49	DESA ULU 'AO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	50	DESA OLO ONUA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	51	DESA AMBOPI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	52	DESA WAWORODA JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
7	TONGAUNA												
	53	DESA LALONGGOWUNA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	54	DESA MOMEA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	55	DESA ANDEPOSANDU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	56	DESA ASAO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAP PEMBAYARAN		KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	ATK	JAMSOS						
	57	DESA AMBEPULU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
8	ANGGABERI													
	58	DESA WUNDUJONGOHI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	59	DESA LEREHOMA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
9	UEPAI													
	60	DESA MATAHOALU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	61	DESA BARUGA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	62	DESA ANGGOPIU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	63	DESA ANGGAWO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	64	DESA PUURODA JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	65	DESA AMERORO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	66	DESA RAWUA*	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	67	DESA TAMESANDI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	68	DESA PANGGULAWU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	69	DESA TANGGODIPO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	70	DESA AMAROA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
10	LAMBUJA													
	71	DESA WATAREMA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	72	DESA WONUA HOA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	73	DESA MERAHA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	74	DESA WAWORAHA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	75	DESA TANGGOBU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	76	DESA TETE MBOMUA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	77	DESA ASAKI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	78	DESA AWULITI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	79	DESA AMBERI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
11	PURIALA													
	80	DESA UNGGULINO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	81	DESA PUUHOPA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	82	DESA WAWOSANGGULA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	83	DESA POANAHA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	84	DESA AHUA WALI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	85	DESA WATUSA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			







KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA						TAHAP PEMBAYARAN		KET		
				BIDANG PEMERINTAHAN						PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	I		II	
				SILTAP/TUNI.	INSENTIF	TUNJ. BPD	ATK	JAMSOS	AN					
16		WONGGEDUKU												
	115	DESA LALOHAO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	116	DESA BENDEWUTA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	117	DESA WUKUSAO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	118	DESA WAWOONE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	119	DESA ANGGORO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	120	DESA DAWI-DAWI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	121	DESA WOWASOLO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	122	DESA TETE MOTAHA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	123	DESA TAWAROLONDO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	124	DESA LALOUSU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	125	DESA LANGGONAWAWE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	126	DESA POLANDANGI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	127	DESA WAWONGGOLE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
17		WONGGEDUKU BARAT												
	128	DESA LAMBANGI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	129	DESA PUDAY	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	130	DESA ANGGADOLA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	131	DESA LAHOTUTU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	132	DESA TOBIMEITA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	133	DESA WATURAI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	134	DESA RANOTUNDOBU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	135	DESA LAMOKUNI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	136	DESA WONGGEDUKU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	137	DESA BARUGA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	138	DESA AMBUUWIU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	139	DESA TETEWONUA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	140	DESA TETEONA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	141	DESA KASUKIA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
18		MELUHU												
	142	DESA LAMELAI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	143	DESA SAMBASULE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	144	DESA AHULOVA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAP PEMBAYARAN		KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	ATK	JAMSOS						
	145	DESA TUDA MEASO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	146	DESA LAROWIU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	147	DESA LALOPI SI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	19	AMONGGEDO												
	148	DESA MATABURA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	149	DESA WARANDETE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	150	DESA BENUA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	151	DESA LALOMBONDA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	152	DESA WAWOHINE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	153	DESA DUNGGUA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	154	DESA AMONGGEDO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	155	DESA MENDIKONJ	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	156	DESA LALONGNA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	157	DESA WATULAWU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	158	DESA MATAIWOI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	20	PONIDIHAHA												
	159	DESA LALODANGGE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	160	DESA TIRA WUTA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	161	DESA SULEMANDARA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	162	DESA AHUA WATU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	163	DESA MUMU NDOWU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	164	DESA LALONGGOTOMI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	165	DESA AMESIUJ	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	166	DESA PUUMBINISI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	167	DESA HONGOA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	168	DESA WONUA MANDARA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	169	DESA WONUA MONAPA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	170	DESA LAHONGGUMBI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	171	DESA WOWALAHAM BUTI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	172	DESA BELATU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	21	BESULUTU												
	173	DESA PUNGGALUKU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			
	174	DESA AMOSILU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100			



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA										TAHAP PEMBAYARAN		KET
				BIDANG PEMERINTAHAN						PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN				I	II	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	ATK	JAMSOS	AN							
	175	DESA ULU POHARA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	176	DESA ONEMBUITE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	177	DESA ASUNDE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	178	DESA LABELA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	179	DESA LALUMERA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	180	DESA PUUNDOHO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	181	DESA LALOWULO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	182	DESA PUULOWARU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	183	DESA SILEA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	184	DESA WAWORAHA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	185	DESA RANOMOLUA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	186	DESA ANDOMESINGGO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	187	DESA LAWONUA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	22	SAMPARA														
	188	DESA POLUA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	189	DESA BAO - BAO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	190	DESA PUULORO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	191	DESA TOTOMBE JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	192	DESA BAENI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	193	DESA WAWO ANDAROA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	194	DESA ANDAROA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	195	DESA BONDOALA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	196	DESA POHARA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	197	DESA ANDADOWI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	198	DESA KONGGA MEA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	199	DESA ANDEPALI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	200	DESA WAWO LIMBUE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	23	ANGGALOMOARE														
	201	DESA ANDOBEU JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	202	DESA LASOSO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	203	DESA ANGGALOMOARE JAY	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	204	DESA GALU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	205	DESA ABELISAWA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					
	206	DESA ANGGALOMOARE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100					



KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAP PEMBAYARAN		
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	I	II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	ATK	JAMSOS					
				199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	207	DESA PIUSANGI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	208	DESA PIUSAWAH JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	209	DESA LAKOMEA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	210	DESA TABANGGELE	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	25	LALONGGASU MEETO											
	211	DESA PIUWONUA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	212	DESA LALOMBONDA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	213	DESA TOOLAWAWO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	214	DESA BATU GONG	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	215	DESA WAWOBUNGI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	216	DESA TOLI - TOLI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	217	DESA WATU NGGARANDU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	218	DESA LALONGGASUMEETO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	219	DESA NII TANASA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	220	DESA RAPAMBINOPAKA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	221	DESA BUMI INDAH	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	26	BONDOALA											
	222	DESA PEBUNOOHA DALAM	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	223	DESA DIOLO	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	224	DESA RAMBU KONGGA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	225	DESA RUMBIA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	226	DESA LALONGGALUKU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	227	DESA LANGGALUKU TIMUR	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	228	DESA PEBUNOOHA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	229	DESA LAOSU JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	24	MOROSI											
	230	DESA TANGGOBU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	231	DESA TONDOWATU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	232	DESA MOROSI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	233	DESA WONUA MORINI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	234	DESA PAKU JAYA	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	235	DESA PUURUI	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		
	236	DESA MENDIKONU	305.938.200	199.390.200	57.600.000	31.800.000	-	3.048.000	14.100.000	152.969.100	152.969.100		











KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAP PEMBAYARAN		KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	ATK	JAMSOS	155.445.300	155.445.300				
B	286	DESA NARIO INDAH UEPAI	310.890.600	199.390.200	62.400.000	31.800.000	-	3.200.400			14.100.000	155.445.300	155.445.300	
C	287	DESA LANGGOMEA	315.843.000	199.390.200	67.200.000	31.800.000	-	3.352.800	14.100.000	157.921.500	157.921.500			
C	288	DESA KASAEDA PONDIDAHA	315.843.000	199.390.200	67.200.000	31.800.000	-	3.352.800	14.100.000	157.921.500	157.921.500			
C	289	DESA AMBULANU AMONGGEDO	315.843.000	199.390.200	67.200.000	31.800.000	-	3.352.800	14.100.000	157.921.500	157.921.500			
C	290	DESA PUASANA WONGGEDUKU BARAT	315.843.000	199.390.200	67.200.000	31.800.000	-	3.352.800	14.100.000	157.921.500	157.921.500			
D	291	DESA LINONGGASAI	321.315.500	199.390.200	72.000.000	31.800.000	520.100	3.505.200	14.100.000	160.657.750	160.657.750			
		JUMLAH	89.182.060.700	58.022.548.200	16.910.400.000	9.253.800.000	520.100	891.692.400	4.103.100.000	44.591.030.350	44.591.030.350			





**LAMPIRAN I: RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA (KELOMPOK A)**

1	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
	2	3	4	5		6
A	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>					
	<b>SILTAP/TUNJANGAN(PNS)</b>					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	1.915.850,00	12	ob	22.990.200,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	9	KA DUSUN I	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	10	KA DUSUN II	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	11	KA DUSUN III	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	<b>INSENTIF</b>					
	1	RT(6 Org)	500.000,00	72	ob	36.000.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	400.000	12	ob	4.800.000,00
	4	IMAM DESA	400.000	12	ob	4.800.000,00
	<b>TUNJANGAN</b>					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- WAKIL KETUA	550.000,00	12	ob	6.600.000,00
		- SEKRETARIS BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	<b>JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA</b>					
	<b>RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ</b>					
	1	JAMINAN SOSIAL(20 Org)	12.700	240	ob	3.048.000,00
B	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>					
	1	OPRASIONAL PKK	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	400.000	12	ob	4.800.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	400.000	12	ob	4.800.000,00
						305.938.200
		<b>JUMLAH</b>				<b>81.379.561.200</b>





**LAMPIRAN II: RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASIING-MASIING DESA (KELOMPOK B)**

1	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
	2	3	4	5		6
<b>A</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>					
	<b>SILTAP/TUNJANGAN(PNS)</b>					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	1.915.850,00	12	ob	22.990.200,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	9	KA DUSUN I	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	10	KA DUSUN II	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	11	KA DUSUN III	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	<b>INSENTIF</b>					
	1	RT(6 Org)	500.000,00	72	ob	36.000.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	4	IMAM DESA	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	5	PENDETA/MANGKU	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	<b>TUNJANGAN</b>					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- WAKIL KETUA	550.000,00	12	ob	6.600.000,00
		- SEKRETARIS BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	<b>JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA</b>					
	<b>RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ</b>					
	1	JAMINAN SOSIAL(21 Org)	12.700	252	ob	3.200.400,00
<b>B</b>	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>					
	1	OPRASIONAL PKK	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	400.000	12	ob	4.800.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
						310.890.600
	<b>JUMLAH</b>					<b>6.217.812.000</b>





**LAMPIRAN III: RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA (KELOMPOK C)**

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
<b>A</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>					
	<b>SILTAP/TUNJANGAN(PNS)</b>					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	1.915.850,00	12	ob	22.990.200,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	9	KA DUSUN I	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	10	KA DUSUN II	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	11	KA DUSUN III	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	<b>INSENTIF</b>					
	1	RT(6 Org)	500.000,00	72	ob	36.000.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	4	IMAM DESA	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	4	PENDETA	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	6	MANGKU	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	<b>TUNJANGAN</b>					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- WAKIL KETUA	550.000,00	12	ob	6.600.000,00
		- SEKRETARIS BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	<b>JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA</b>					
	<b>RT, TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ</b>					
	1	JAMINAN SOSIAL(22 Org)	12.700	264	ob	3.352.800,00
<b>B</b>	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>					
	1	OPRASIONAL PKK	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	400.000	12	ob	4.800.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
						315.843.000
		<b>JUMLAH</b>				<b>1.263.372.000</b>

  
**BUPATI KONAWA**  
**KERY SAIFUL KONGGOASA**



**LAMPIRAN IV: RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA (KELOMPOK D)**

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
<b>A</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>					
	<b>SILTAP/TUNJANGAN(PNS)</b>					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	1.915.850,00	12	ob	22.990.200,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.300.000,00	12	ob	15.500.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	9	KA DUSUN I	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	10	KA DUSUN II	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	11	KA DUSUN III	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	<b>INSENTIF</b>					
	1	RT(6 Org)	500.000,00	72	ob	36.000.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	4	IMAM DESA	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	4	PENDETA	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	6	MANGKU	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	7	BIKSU/PASTOR	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	<b>TUNJANGAN</b>					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- WAKIL KETUA	550.000,00	12	ob	6.600.000,00
		- SEKRETARIS BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	<b>JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA</b>					
	<b>RT, TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ</b>					
	1	JAMINAN SOSIAL(23 Org)	12.700	276	ob	3.505.200,00
<b>B</b>	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>					
	1	OPRASIONAL PKK	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	400.000	12	ob	4.800.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
<b>C</b>	<b>OPERASIONAL KANTOR</b>					
	1	Alat Tulis Kantor	520.100	1	Ls	520.100,00
	<b>JUMLAH</b>					<b>321.315.500</b>





LAMPIRAN VI : DAFTAR REKENING KAS DESA  
 SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN/ DESA	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR REKENING	KET
1	DESA AMAROA	DESA AMAROA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021743-7	
	DESA RAWUA	DESA RAWUA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021718-8	
	DESA AMERORO	DESA AMERORO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021768-0	
	DESA ANGGOPIU	DESA ANGGOPIU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022000-1	
	DESA OLO-OLOHO	DESA OLO-OLOHO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021753-1	
	DESA LANGGOMEA	DESA LANGGOMEA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021727-9	
	DESA MATAHOALU	DESA MATAHOALU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021755-3	
	DESA TAWAROTEBOTA	DESA TAWAROTEBOTA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02 .01. 001154-9	
	DESA TAWAMELEWE	DESA TAWAMELEWE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021778-4	
	DESA BARUGA	DESA BARUGA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021951-3	
	DESA TAMESANDI	DESA TAMESANDI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021710-3	
	DESA HUMBOTO	DESA HUMBOTO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021736-1	
	DESA ANGGAWO	DESA ANGGAWO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021733-4	
	DESA KASAEDA	DESA KASAEDA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021859-4	
	DESA TANGGONDIPO	DESA TANGGONDIPO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021728-1	
	DESA PANGGULAWU	DESA PANGGULAWU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021903-3	
	DESA PUURODA JAYA	DESA PUURODA JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021716-4	
2	ONEMBUTE				
	DESA NAPOOSI	DESA NAPOOSI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021840-5	
	DESA TRIMULYA	DESA TRIMULYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021857-1	
	DESA MATAIWOI	DESA MATAIWOI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 024265-0	
	DESA ULU MERAKA	DESA ULU MERAKA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02.01.021848-1	
	DESA SILEA	DESA SILEA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021912-4	
	DESA KUMAPO	DESA KUMAPO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021841-7	
	DESA KASUMEIA	DESA KASUMEIA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021844-2	
DESA ULU ONEMBUTE	DESA ULU ONEMBUTE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023134-3		



3	26	DESA	TAWAPANDERE	DESA TAWAPANDERE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023663-8
	27	DESA	ANGGALOOSI	DESA ANGGALOOSI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 001532-4
	28	DESA	ANA ONEMBUTE	DESA ANA ONEMBUTE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 001.708-4
4	WAWOTOBI					
	29	DESA	KASUMEWUHO	DESA KASUMEWUHO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.022033-3
	ANGGOTOA					
5	30	DESA	NARIO INDAH	DESA NARIO INDAH	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.022035-7
	31	DESA	KARANDU	DESA KARANDU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021868-5
	32	DESA	KORJIMBA	DESA KORUMBA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.022088-6
6	33	DESA	ANGGOTOA	DESA ANGGOTOA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022050-3
	34	DESA	ANALAHUMBUTI	DESA ANALAHUMBUTI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022051-5
	35	DESA	KUKULURI	DESA KUKULURI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022014-1
7	ANGGABERI					
	36	DESA	WUNDUONGOHI	DESA WUNDUONGOHI	BPD SULAWESI TENGGARA	231 02. 01. 001566-7
	37	DESA	LEREHOMA	DESA LEREHOMA	BPD SULAWESI TENGGARA	031 02. 01. 001130-6
8	KONAWE					
	38	DESA	DESA. SANGGONA	DESA SANGGONA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021917-3
	39	DESA	DESA. HUDOA	DESA HUDOA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021933-0
9	40	DESA	DESA. UELAWU	DESA UELAWU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021880-6
	41	DESA	DESA. UETE	DESA UETE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.022006-1
	42	DESA	DESA. MOKOWU	DESA MGKOWU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021919-7
10	43	DESA	DESA. ASONIWOWO	DESA ASONIWOWO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.023017-1
	44	DESA	DESA. WONUA MBAE	DESA WONUAMBAE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.023695-1
	45	DESA	DESA. PUUWONUA	DESA PUUWONUA	BPD SULAWESI TENGGARA	231 02. 01. 001596-8
11	TONGAUNA					
	46	DESA	LALONGGOWUNA	DESA LALONGGOWUNA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021948-3
	47	DESA	ASAO	DESA ASAO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021921-5
12	48	DESA	MOMEA	DESA MOMEA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021950-0
	49	DESA	ANDEPOSANDU	DESA ANDEPOSANDU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021916-0
	50	DESA	AMBEPULU	DESA AMBEPULU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021911-2
13	WONGGEDUKU					
	51	DESA	DURIAASI	DESA DURIAASI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021817-1



	52	DESA LALOUSU	DESA LALOUSU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021858-2
	53	DESA BENDEWUTA	DESA BENDEWUTA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021862-4
	54	DESA WUKUSAO	DESA WUKUSAO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021965-3
	55	DESA LALOHAO	DESA LALOHAO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021772-3
	56	DESA WAWONGGOLE	DESA WAWONGGOLE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021905-7
	57	DESA TETEMOTAHA	DESA TETEMOTAHA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021775-9
	58	DESA WAWOONE	DESA WAWOONE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021777-2
	59	DESA WAWOSOLO	DESA WAWOSOLO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021795-4
	60	DESA LANGGONAWE	DESA LANGGONAWE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022042-4
	61	DESA DAWI-DAWI	DESA DAWI-DAWI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021825-9
	62	DESA POLANDANGI	DESA POLANDANGI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021914-8
	63	DESA TAWAROLONDO	DESA TAWAROLONDO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.023718-7
	64	DESA ANGGORO	DESA ANGGORO	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000254-4
9	LAMBUYA				
	65	DESA ASAKI	DESA ASAKI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021889-2
	66	DESA WAWORAH	DESA WAWORAH	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021725-5
	67	DESA AWULITI	DESA AWULITI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021887-9
	68	DESA AMBERI	DESA AMBERI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021958-6
	69	DESA MERAKA	DESA MERAKA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022069-2
	70	DESA TANGGOBU	DESA TANGGOBU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021956-2
	71	DESA WATAREMA	DESA WATAREMA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021884-3
	72	DESA WONUA HOA	DESA WONUA HOA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022045-1
	73	DESA TETEMBOMUA	DESA TETEMBOMUA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021878-8
10	ABUKI				
	74	DESA ASOLU	DESA ASOLU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021895-8
	75	DESA SAMBEANI	DESA SAMBEANI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021891-1
	76	DESA PUNGGALUKU	DESA PUNGGALUKU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021997-5
	77	DESA WALAY	DESA WALAY	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021838-7
	78	DESA EPEEA	DESA EPEEA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021827-2
	79	DESA KUMAPO	DESA KUMAPO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021841-7
	80	DESA UNAASI JAYA	DESA UNAASI JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021901-1
	81	DESA ARUBIA JAYA	DESA ARUBIA JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023700-1
	82	DESA KASUWURA	DESA KASUWURA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.023680-8



83	DESA	PADANGGUNI UTAMA	DESA PADANGGUNI UTAMA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.023681-1
84	DESA	ANGGORO	DESA ANGGORO	BPD SULAWESI TENGGARA	231 02. 01. 001300-5
11	MELUHU				
85	DESA	LAMELAY	DESA LAMELAY	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022189-1
86	DESA	AHUHU	DESA AHUHU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022011-4
87	DESA	WOERAHI	DESA WOERAHI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022070-9
88	DESA	LAROWIU	DESA LAROWIU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022086-2
89	DESA	TUDAMEASO	DESA TUDAMEASO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022071-1
90	DESA	AHULOA	DESA AHULOA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021931-8
91	DESA	SAMBASULE	DESA SAMBASULE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022063-0
92	DESA	LALOPISI	DESA LALOPISI	BPD SULAWESI TENGGARA	217 02. 01. 001122-1
12	LATOMA				
93	DESA	AMBEKAIRI UTAMA	DESA AMBEKAIRI UTAMA	BPD SILAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021920-3
94	DESA	LATOMA JAYA	DESA LATOMA JAYA	BPD SILAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022054-1
95	DESA	LALOWATA	DESA LALOWATA	BPD SILAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022002-3
96	DESA	ANDOLUTO	DESA ANDOLUTO	BPD SILAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022047-3
97	DESA	AMBONIKI	DESA AMBONIKI	BPD SILAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022060-6
98	DESA	TITOWA	DESA TITOWA	BPD SILAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022003-5
99	DESA	NESOWI	DESA NESOWI	BPD SILAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022065-5
100	DESA	ANGONGA	DESA ANGONGA	BPD SILAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022061-8
101	DESA	WAWOLATOMA	DESA WAWOLATOMA	BPD SILAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022066-7
102	DESA	PINOLE	DESA PINOLE	BPD SILAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022062-1
13	PURIALA				
103	DESA	LALONGGATU	DESA LALONGGATU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021828-4
104	DESA	PUUSANGI	DESA PUUSANGI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021788-7
105	DESA	WONUA MORAME	DESA WONUA MORAME	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021799-0
106	DESA	SONAI	DESA SONAI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021786-3
107	DESA	POANAHA	DESA POANAHA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021790-5
108	DESA	PURIALA	DESA PURIALA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021870-3
109	DESA	WATUSA	DESA WATUSA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021866-0
110	DESA	AHUAWALI	DESA AHUAWALI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021798-1
111	DESA	UNGGULINO	DESA UNGGULINO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021973-2
112	DESA	MOKALELEO	DESA MOKALELEO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021789-9



113	DESA	TETEWATU	DESA TETEWATU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021872-7
114	DESA	WAWOSANGGULA	DESA WAWOSANGGULA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023011-9
115	DESA	TETEHAHA	DESA TETEHAHA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023035-0
116	DESA	LALOONAHA	DESA LALOONAHA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022959-2
117	DESA	DESA PUUHOPA	DESA PUUHOPA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023014-4
14	PONDIDAHA				
118	DESA	AHUAWATU	DESA AHUAWATU	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000440-0
119	DESA	WAWOLEMO	DESA WAWOLEMO	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000618-5
120	DESA	AMESIU	DESA AMESIU	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000442-5
121	DESA	HONGOA	DESA HONGOA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022053-9
122	DESA	AMBUULANU	DESA AMBUULANU	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000452-8
123	DESA	TIRAWUTA	DESA TIRAWUTA	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000456-5
124	DESA	MUMUNDOWU	DESA MUMUNDOWU	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000446-2
125	DESA	BELATU	DESA BELATU	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000448-6
126	DESA	PUUMBINISI	DESA PUUMBINISI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021855-7
127	DESA	LALOIKA	DESA LALOIKA	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000990-3
128	DESA	LALONGGOTOMI	DESA LALONGGOTOMI	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000994-1
129	DESA	LALODANGGE	DESA LALODANGGE	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000998-8
130	DESA	WAWOLAHAMBUJI	DESA WAWOLAHAMBUJI	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000450-4
131	DESA	WONUA MANDARA	DESA WONUA MANDARA	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000988-5
132	DESA	SULEMANDARA	DESA SULEMANDARA	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000992-7
133	DESA	WONUA MONAPA	DESA WONUA MONAPA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023717-5
134	DESA	LAHONGGUMBI	DESA LAHONGGUMBI	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000366-4
15	AMONGGEDO				
135	DESA	MATABURA	DESA MATABURA	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000604-5
136	DESA	DUNGGUA	DESA DUNGGUA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022208-0
137	DESA	BENUA	DESA BENUA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021899-5
138	DESA	ANAHINUNU	DESA ANAHINUNU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022258-5
139	DESA	ULU BENUA	DESA ULU BENUA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022124-6
140	DESA	PUASANA	DESA PUASANA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022127-0
141	DESA	LALONONA	DESA LALONONA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022194-5
142	DESA	WAWOHINE	DESA WAWOHINE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022151-9
143	DESA	WATULAWU	DESA WATULAWU	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000602-0



144	DESA	MENDIKONU	MENDIKONU	DESA MENDIKONU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022265-2
145	DESA	AMANDETE	AMANDETE	DESA AMANDETE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022204-4
146	DESA	AMONGGEDO	AMONGGEDO	DESA AMONGGEDO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022101-5
147	DESA	MATAIWOI	MATAIWOI	DESA MATAIWOI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021995-0
148	DESA	LALOMBONDA	LALOMBONDA	DESA LALOMBONDA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021746-2
16	SAMPARA					
149	DESA	ANDEPALI	ANDEPALI	DESA ANDEPALI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021809-1
150	DESA	PUULORO	PUULORO	DESA PUULORO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021826-1
151	DESA	TOTOMBE JAYA	TOTOMBE JAYA	DESA TOTOMBE JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021806-5
152	DESA	WAWOLIMBUE	WAWOLIMBUE	DESA WAWOLIMBUE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021856-9
153	DESA	POLUA	POLUA	DESA POLUA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021785-0
154	DESA	BAO-BAO	BAO-BAO	DESA BAO-BAO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021815-6
155	DESA	POHARA	POHARA	DESA POHARA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021865-1
156	DESA	ANDAROA	ANDAROA	DESA ANDAROA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021837-5
157	DESA	BONDOALA	BONDOALA	DESA BONDOALA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021792-9
158	DESA	KONGGAMEA	KONGGAMEA	DESA KONGGAMEA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021796-6
159	DESA	ANDADOWI	ANDADOWI	DESA ANDADOWI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021814-4
160	DESA	BAENI	BAENI	DESA BAENI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021801-6
161	DESA	WOWA ANDAROA	WOWA ANDAROA	DESA WOWA ANDAROA	BPD SULAWESI TENGGARA	231 02. 01.001602-1
17	BESULUTU					
162	DESA	LALOUMERA	LALOUMERA	DESA LALOUMERA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021968-9
163	DESA	ULU POHARA	ULU POHARA	DESA ULU POHARA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021886-7
164	DESA	LABELA	LABELA	DESA LABELA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021900-8
165	DESA	ASUNDE	ASUNDE	DESA ASUNDE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021922-7
166	DESA	AMOSILU	AMOSILU	DESA AMOSILU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021938-1
167	DESA	LAWONUA	LAWONUA	DESA LAWONUA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022103-9
168	DESA	SILEA	SILEA	DESA SILEA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021831-4
169	DESA	RANOMOLUA	RANOMOLUA	DESA RANOMOLUA	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000266-1
170	DESA	ONEMBUTE	ONEMBUTE	DESA ONEMBUTE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021908-2
171	DESA	PUULOWARU	PUULOWARU	DESA PUULOWARU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021949-5
172	DESA	ADOMESINGGO	ADOMESINGGO	DESA ADOMESINGGO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021962-8
173	DESA	PUUNDOHO	PUUNDOHO	DESA PUUNDOHO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023704-7
174	DESA	PUUNGALUKU	PUUNGALUKU	DESA PUUNGALUKU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023030-2



175	DESA	WAWORAHA	DESA WAWORAHA	BPD SULAWESI TENGGARA	231 02. 01. 001396-1
176	DESA	LALOWULO	DESA LALOWULO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 004838-1
18	BONDOALA				
177	DESA	PEBUNOOHA DALAM	DESA PEBUNOOHA DALAM	BPD SULAESI TENGGARA	005 02. 01. 021883-0
178	DESA	PEBUNOOHA	DESA PEBUNOOHA	BPD SULAESI TENGGARA	005 02. 01. 021834-1
179	DESA	LALONGGALUKU	DESA LALONGGALUKU	BPD SULAESI TENGGARA	005 02. 01. 021882-1
180	DESA	RUMBIA	DESA RUMBIA	BPD SULAESI TENGGARA	005 02. 01. 022075-8
181	DESA	DILOLO	DESA DILOLO	BPD SULAESI TENGGARA	005 02. 01. 021863-6
182	DESA	RAMBU KONGGA	DESA RAMBU KONGGA	BPD SULAESI TENGGARA	005 02. 01. 023658-4
183	DESA	LAOSU JAYA	DESA LAOSU JAYA	BPD SULAESI TENGGARA	005 02. 01. 023659-6
184	DESA	LALONGGALUKU TIMUR	DESA LALONGGALUKU TIMUR	BPD SULAESI TENGGARA	
19	SOROPIA				
185	DESA	TAPULANGA	DESA TAPULANGA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021762-1
186	DESA	BAJO INDAH	DESA BAJO INDAH	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021723-0
187	DESA	SORUE JAYA	DESA SORUE JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021722-1
188	DESA	MEKAR	DESA MEKAR	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021730-9
189	DESA	BOKORI	DESA BOKORI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021752-8
190	DESA	ATOWATU	DESA ATOWATU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021720-6
191	DESA	SAWAPUDO	DESA SAWAPUDO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021721-8
192	DESA	WAWORAHA	DESA WAWORAHA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021725-5
193	DESA	SAPONDA DARAT	DESA SAPONDA DARAT	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021724-3
194	DESA	SOROPIA	DESA SOROPIA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021734-0
195	DESA	SAPONDA LAUT	DESA SAPONDA LAUT	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021732-2
196	DESA	BAJOE	DESA BAJOE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021737-0
197	DESA	LEPPE	DESA LEPPE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021738-3
198	DESA	TELAGA BIRU	DESA TELAGA BIRU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021729-2
20	LALONGGASUMEETO				
199	DESA	NII TANASA	DESA NII TANASA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021740-0
200	DESA	RAPAMBINOPAKA	DESA RAPAMBINOPAKA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021741-3
201	DESA	LALOMBONDA	DESA LALOMBONDA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021746-2
202	DESA	LALONGGASUMEETO	DESA LALONGGASUMEETO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021748-6
203	DESA	PUUWONUA	DESA PUUWONUA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.022038-2
204	DESA	BUMI INDAH	DESA BUMI INDAH	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021749-8



205	DESA	TOOLAWAWO	DESA TOOLAWAWO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021747-4
206	DESA	WATUNGGARANDU	DESA WATUNGGARANDU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021742-5
207	DESA	TOLI-TOLI	DESA TOLI-TOLI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021745-1
208	DESA	WAWOBUNGI	DESA WAWOBUNGI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021744-9
209	DESA	BATU GONG	DESA BATU GONG	BPD SULAWESI TENGGARA	231 02. 01. 001394-7
21	ROUTA				
210	DESA	WALANDawe	DESA WALANDawe	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022012-6
211	DESA	TIRAWONUA	DESA TIRAWONUA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022015-0
212	DESA	PARUDONGKA	DESA PARUDONGKA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022202-1
213	DESA	PUUWIWIRANO	DESA PUUWIWIRANO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022040-1
214	DESA	TANGGOLA	DESA TANGGOLA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022131-3
215	DESA	LALOMERUI	DESA LALOMERUI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021996-3
22	KAPOIALA				
216	DESA	LALIMBUE JAYA	DESA LALIMBUE JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022085-1
217	DESA	LALIMBUE	DESA LALIMBUE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022091-6
218	DESA	LABOTOY	DESA LABOTOY	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022052-7
219	DESA	MUARA SAMPARA	DESA MUARA SAMPARA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022084-9
220	DESA	SAMBARAASI	DESA SAMBARAASI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022082-5
221	DESA	LAMENDORA	DESA LAMENDORA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022083-7
222	DESA	ULU LALIMBUE	DESA ULU LALIMBUE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022090-4
223	DESA	PEREO'A	DESA PEREO'A	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022087-4
224	DESA	TANI INDAH	DESA TANI INDAH	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022089-8
225	DESA	LALONGGOMBUNO	DESA LALONGGOMBUNO	BPD SULAWESI TENGGARA	001 02. 01. 193183-5
226	DESA	TOMBAWATU	DESA TOMBAWATU	BPD SULAWESI TENGGARA	001 02. 01. 193181-0
227	DESA	KAPOIALA BARU	DESA KAPOIALA BARU	BPD SULAWESI TENGGARA	001 02. 01. 193180-1
228	DESA	LABOTOY JAYA	DESA LABOTOY JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	001 02. 01. 000123-1
23	ASINUA				
229	DESA	LASADA	DESA LASADA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021896-1
230	DESA	NEKUDU	DESA NEKUDU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021961-9
231	DESA	ASINUA JAYA	DESA ASINUA JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022116-7
232	DESA	ANGOHI	DESA ANGOHI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021979-3
233	DESA	AWUA SARI	DESA AWUA SARI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023697-3
234	DESA	AWUA JAYA	DESA AWUA JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023699-7



235	DESA	ASIPAKO	DESA ASIPAKO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023698-5
24	WONGGEDUKU BARAT				
236	DESA	LAMOKUNI	DESA LAMOKUNI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021940-9
237	DESA	BARUGA	DESA BARUGA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021860-1
238	DESA	LAHOTUTU	DESA LAHOTUTU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021915-1
239	DESA	LAMBANGI	DESA LAMBANGI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021906-9
240	DESA	WATURAI	DESA WATURAI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021893-4
241	DESA	KASUKIA	DESA KASUKIA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021773-5
242	DESA	PUDAY	DESA PUDAY	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021787-5
243	DESA	TETEONA	DESA TETEONA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021842-9
244	DESA	WONGGEDUKU	DESA WONGGEDUKU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021783-8
245	DESA	LINONGGASAI	DESA LINONGGASAI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021779-6
246	DESA	TOBIMEITA	DESA TOBIMEITA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021953-7
247	DESA	AMBUWIU	DESA AMBUWIU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021885-5
248	DESA	RANOTUMDOBU	DESA RANOTUMDOBU	BPD SULAWESI TENGGARA	217 02. 01. 003996-4
249	DESA	ANGGADOLA	DESA ANGGADOLA	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000242-8
250	DESA	TETEWONUA	DESA TETEWONUA	BPD SULAWESI TENGGARA	224 02. 01. 000966-6
25	PADANGGUNI				
251	DESA	PADANGGUNI	DESA PADANGGUNI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021822-3
252	DESA	ALOSIKA	DESA ALOSIKA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021994-1
253	DESA	LANGGEA	DESA LANGGEA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021821-0
254	DESA	SAMBAOSU	DESA SAMBAOSU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021845-4
255	DESA	ALEUTI	DESA ALEUTI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021811-9
256	DESA	ATODOPI	DESA ATODOPI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021970-7
257	DESA	PADANG MEKAR	DESA PADANG MEKAR	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021824-7
258	DESA	MATANGGORAI	DESA MATANGGORAI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021913-6
259	DESA	MATAHORI	DESA MATAHORI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021839-9
260	DESA	MEKAR JAYA	DESA MEKAR JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023679-9
261	DESA	GARUDA	DESA GARUDA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023689-4
26	ANGGALOMOARE				
262	DESA	DESA ANGGALAMOARE	DESA ANGGALAMOARE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021802-8
263	DESA	DESA ABELISAWAH	DESA ABELISAWAH	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021823-5
264	DESA	DESA LAKOMEA	DESA LAKOMEA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021843-1



265	DESA GALU	DESA GALU	DESA GALU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021187-9
266	DESA PUUSANGI	DESA PUUSANGI	DESA PUUSANGI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021793-1
267	DESA TABANGGELE	DESA TABANGGELE	DESA TABANGGELE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021800-4
268	DESA LASOSO	DESA LASOSO	DESA LASOSO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021890-9
269	DESA ANGGALAMOARE JAYA	DESA ANGGALAMOARE JAYA	DESA ANGGALAMOARE JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.000174-1
270	DESA ANDOBEU JAYA	DESA ANDOBEU JAYA	DESA ANDOBEU JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 000172-6
271	DESA PUUSAWAH JAYA	DESA PUUSAWAH JAYA	DESA PUUSAWAH JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 004844-5
27	MOROSI				
272	DESA BESU	DESA BESU	DESA BESU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022094-0
273	DESA PAKU JAYA	DESA PAKU JAYA	DESA PAKU JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021876-4
274	DESA PAKU	DESA PAKU	DESA PAKU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021832-6
275	DESA MENDIKONU	DESA MENDIKONU	DESA MENDIKONU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022097-7
276	DESA MCROSI	DESA MCROSI	DESA MOROSI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021813-2
277	DESA PUURUY	DESA PUURUY	DESA PUURUY	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021871-5
278	DESA WONUA MORINI	DESA WONUA MORINI	DESA WONUA MORINI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021879-1
279	DESA TONDOWATU	DESA TONDOWATU	DESA TONDOWATU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021936-7
280	DESA TANGGOBU	DESA TANGGOBU	DESA TANGGOBU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021869-7
281	DESA PORARA	DESA PORARA	DESA PORARA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.023723-1
28	TONGAUNA UTARA				
282	DESA WAWORODA JAYA	DESA WAWORODA JAYA	DESA WAWORODA JAYA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021954-9
283	DESA SANUANGGAMO	DESA SANUANGGAMO	DESA SANUANGGAMO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021937-9
284	DESA PUJNDOMBI	DESA PUJNDOMBI	DESA PUUNDOMBI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021960-4
285	DESA AMBOPI	DESA AMBOPI	DESA AMBOPI	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021939-2
286	DESA ULUAO	DESA ULUAO	DESA ULUAO	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.021942-2
287	DESA NAMBEABORU	DESA NAMBEABORU	DESA NAMBEABORU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021947-0
288	DESA OLO ONUA	DESA OLO ONUA	DESA OLO ONUA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 021918-5
289	DESA ANGGOHU	DESA ANGGOHU	DESA ANGGOHU	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 022171-4
290	DESA ANDALAMBE	DESA ANDALAMBE	DESA ANDALAMBE	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01. 023710-2
291	DESA BAROWILA	DESA BAROWILA	DESA BAROWILA	BPD SULAWESI TENGGARA	005 02. 01.023708-4

